



Anggaran JDP Kota Naik Rp2 M

Bantuan Keringanan Tunggakan SPP Sekolah Ditambah

PERSYARATAN PENGAJUAN

- Berkas persyaratan yang dilengkapi seperti rincian tunggakan dari sekolah, surat keterangan dari sekolah tentang kondisi ekonomi orang tua siswa, fotokopi C1, fotokopi ijazah rapor dan surat pernyataan tidak mampu bayar tunggakan dari orang tua bermaterai Rp 6 ribu dengan mengetahui RT-RW.
- Surat dibawa ke Dinas Sosial Kota untuk mendapat rekomendasi, selanjutnya dibawa ke Dinas Pendidikan. Siswa yang dapat mengakses adalah yang naik kelas 5 dan lulus kelas 6 SD/ sederajat, naik kelas 8 dan lulus kelas 9 SMP/ sederajat, naik kelas 11 dan lulus kelas 12 SMA/ SMK/ sederajat.
- Di samping itu siswa lulus SD, SMP, SMA/ SMK atau sederajat yang lulus tahun 2010 sampai dengan 2019.
- Khusus siswa KMS yang sekolah di dalam Kota dapat mengakses diurus melalui sekolah masing-masing.

YOGYA. TRIBUN - Anggaran Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) Kota Yogyakarta ditambah Rp1,3 miliar. Jika sebelumnya anggaran JPD Kota Yogyakarta sekitar Rp700 juta, maka tahun ini ditambah menjadi Rp2 miliar.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori mengatakan JPD adalah bantuan untuk keringanan tunggakan SPP sekolah. Tujuan dari penambahan anggaran tersebut adalah untuk membantu orangtua siswa yang kesulitan membayar SPP selama pandemi Covid-19.

"Awalnya Rp700 juta, sekarang sudah dinaikkan menjadi Rp2 miliar. Itu anggaran tahun 2020 ini. Untukantisipasi saja, jika ada orang tua yang keberatan membayar SPP, makanya kami longgarkan," katanya kepada *Tribun Jogja*, Senin (1/6).

Ia melanjutkan JPD Kota Yogyakarta diperuntukkan bagi warga Kota Yogyakarta yang terdaftar dalam Kartu Menuju Sehat (KMS). Besaran masing-masing siswa pun berbeda-beda. Selain disesuaikan dengan kemampuan ekonomi, juga disesuaikan dengan tunggakan, juga disesuaikan dengan kemampuan ekonomi.

"Jadi untuk penerima JPD ini nanti ada skor-skornya, besaran per siswa juga beda-beda. Tentu JPD diberikan untuk siswa yang memiliki tunggakan dalam membayar SPP, selain itu juga

warga Kota Yogyakarta yang masuk dalam KMS," lanjutnya.

JPD dapat mengakomodasi siswa di jenjang SD dan SMP swasta. "Yang negeri kan tidak ada pengeluaran, karena sudah gratis," sambungnya.

Pihaknya akan melakukan evaluasi terkait penarikan SPP di sekolah swasta di tengah pandemi Covid-19. Ia mengakui bahwa sekolah swasta sangat mengandalkan dana partisipasi orangtua, namun demikian sekolah masih bisa memanfaatkan BOSDA swasta.

"Anggaran paling besar memang dana partisipasi orang tua, tetapi kan dari kami (Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta) juga ada bantuan BOSDA swasta. Harapannya BOSDA bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, kami akan evaluasi lagi," terangnya.

Rekomendasi

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Agus Sudrajat menambahkan salah satu syarat untuk mendapat JPD Kota Yogyakarta adalah rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Yogyakarta.

"Nanti kami buat rekomendasi, tentu harus ada pengajuan dulu, kami akan cek ke lapangan, melakukan verifikasi. Kemudian, nanti kami terbitkan surat rekomendasi. Yang mengeluarkan tetap dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta," tambahnya. (maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005